

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Mutmainna

Universitas Fajar

Jl. Prof. Basalamah (eks Racing Centre) Makassar

Muhammad Iqbal

Politeknik Negeri Ujung Pandang

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea

iqbalrisi@gmail.com

Abstract: *This study aimed to examine the effect of change of leadership, planning documents, administrative records system, competence of human resources, and procurement documents to the budget absorption at the working units in provincial government of South Sulawesi. The samples were 54 respondents who occupy in fields related to the budget, including committed officer, technical activity executing officials, signatories warrant officer, and treasurer to pay the 15 working units South Sulawesi Provincial Government. The results of the study with multiple linear regression showed change of leadership, planning documents, competence of human resources, and procurement documents have significant effect on the budget absorption. Administrative records system has no significant effect on the budget absorption.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pergantian pimpinan, dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dan dokumen pengadaan terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel penelitian adalah 54 responden yang menduduki jabatan di bidang yang berkaitan dengan anggaran, diantaranya adalah pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penandatanganan surat perintah membayar dan bendahara pengeluaran pada 15 SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian dengan regresi linier berganda menunjukkan pergantian pimpinan, dokumen perencanaan, kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran, dan dokumen pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pencatatan administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Kata Kunci: Pergantian Pimpinan, Dokumen Perencanaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dokumen Pengadaan, Penyerapan Anggaran.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilaksanakan melalui perencanaan yang dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik itu perencanaan jangka panjang maupun perencanaan satu tahunan. Perencanaan dalam satu tahun tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang selanjutnya diturunkan dalam bentuk anggaran kegiatan sehingga menghasilkan dokumen anggaran. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setiap tahunnya berkewajiban menyusun dokumen anggaran. Dokumen anggaran untuk pemerintah pusat diberi nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara dokumen anggaran untuk pemerintah daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Setelah ditetapkan melalui rapat paripurna di legislatif, pemerintah selanjutnya bekerja berdasarkan APBN/APBD yang telah ditetapkan tersebut. Realisasi anggaran berjalan dalam jangka waktu satu tahun anggaran mulai dari Januari hingga Desember demi tercapainya tujuan pemerintahan yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Efektivitas kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pemerintah merealisasikan anggaran yang telah disusun. Keterbatasan sumber penerimaan negara mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dalam mengalokasikan anggaran. Ketika pemerintah gagal memenuhi target penyerapan anggaran berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran (Putri, 2014). Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan tingkat penyerapan anggaran tinggi.

Permasalahan terkait dengan penyerapan anggaran pemerintah antara lain tingkat serapan anggaran rendah (tidak mencapai 100%) dan serapan anggaran yang bertumpuk pada kuartal terakhir tahun anggaran. Keterlambatan realisasi anggaran yang bertumpuk pada kuartal terakhir tahun anggaran berdampak pada kualitas kinerja pemerintah. Pengamatan peneliti, banyak kegiatan baik berupa pembangunan fisik maupun kegiatan pelatihan dan pemberdayaan yang baru dimulai pada bulan-bulan terakhir tahun anggaran. Hal ini menimbulkan persepsi di mata masyarakat jika pemerintah hanya mengejar output kegiatan dan pencapaian realisasi tapi mengesampingkan *outcome* (manfaat) dan kualitas dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan LAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, pemerintah provinsi gagal dalam mencapai realisasi anggaran. Tahun 2015, total anggaran belanja daerah pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 6.619.513.468.360,82 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp 6.149.633.266.692,24 atau sebesar 92,90%. Sedangkan pada aspek pendapatan, realisasi pendapatan hanya sebesar 94,72% dari total Rp 6.445.779.161.296,00. Data ini menjelaskan bahwa daya serap anggaran pemerintah provinsi Sulawesi Selatan belum mencapai yang direncanakan.

Beberapa penelitian sebelumnya, menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pemerintah. Arif dan Halim (2015) dengan pendekatan kualitatif menguraikan pengaruh pergantian pimpinan Satuan Kerja

Mutmainna, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran...

Perangkat daerah (SKPD) terhadap penyerapan anggaran. Penelitian Heryanto (2012) menunjukkan pengaruh faktor sistem administrasi dan kompetensi SDM, dan dokumen pengadaan terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian ini mencoba menggabungkan beberapa faktor (pergantian pimpinan SKPD, dokumen perencanaan, sistem administrasi, kompetensi SDM, dan dokumen pengadaan yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu dalam sebuah model melalui uji regresi berganda. Penelitian ini dilakukan pada SKPD dalam lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Belanja Pemerintah dan Teori Stakeholder

Para ahli ekonomi menyadari bahwa pengeluaran pemerintah memegang peranan penting dalam pembangunan sebuah negara. Pengeluaran pemerintah mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan barang publik yang tidak semua bisa disediakan oleh swasta. Wagner dalam Miliasi (2012) berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah (government expenditure) pada setiap negara akan tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan output negara tersebut. Lebih lanjut, Miliasih (2012) menguraikan bahwa investasi publik oleh pemerintah lebih tinggi dibanding investasi swasta. Investasi publik digunakan untuk pembangunan modal sosial, seperti sarana transportasi, sarana pendidikan dan kesehatan, serta untuk meningkatkan skill tenaga kerja.

Teori *stakeholder* menguraikan bahwa sebuah sistem sosial terdiri dari beberapa stakeholder yang perilaku dan tindakannya saling mempengaruhi. Dalam konteks negara, pemerintah merupakan stakeholder yang penting dalam memajukan sebuah negara. Demikian halnya di tingkat daerah, pemerintah daerah adalah stakeholder yang pengaruhnya cukup signifikan terhadap pembangunan di daerah.

Anggaran (Budget) dan Penganggaran (Budgeting)

Halim (2004: 12) mengutip The National Committee on Governmental Accounting (NCGA), "*a budget is a plan of financial operation embodying an estimated of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them.*" Dalam Pasal 14 Ayat (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 telah disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga. "Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran" (Mardiasmo, 2009:61). Lebih lanjut, Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat hubungan yang erat antara anggaran, perencanaan dan pengendalian, dimana perencanaan digunakan untuk melihat kedepan terkait dengan tindakan apa yang seharusnya diambil untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan pengendalian lebih melihat kebelakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan perencanaan.

Dalam perkembangannya, model penganggaran yang berlaku berubah seiring upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa jenis model penganggaran dikembangkan selama ini antara lain:

1. *Line-Item Budgeting*
Model ini merupakan bentuk anggaran ini dikenal juga dengan istilah *traditional budgeting* karena model ini merupakan model penganggaran yang lama dan umumnya organisasi sector publik tidak menggunakan model ini. Model ini relatif sederhana karena disusun dengan cara merinci jenis pendapatan dan belanja dan mengalokasikan anggaran secara garis lurus tanpa mengukur tingkat prioritas dan aktivitas.
2. *Incremental budgeting*
Penganggaran model ini menggunakan bentuk *line-item*, hanya saja cara mengalokasikan anggaran dengan menambahkan atau mengurangi nilai anggaran berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
3. *Planning Programming Budgeting System (PPBS)*
Model PPBS dikembangkan untuk membantu para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan anggaran berdasarkan pendekatan ilmiah dari model-model manajemen keuangan yang ada. Dalam model ini, anggaran disusun dengan menggunakan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*).
4. *Zero Based Budgeting*
Model ini berkebalikan dari model *incremental budgeting*. Anggaran disusun dengan mengabaikan anggaran tahun sebelumnya. Anggaran disusun dari nol meskipun pada tahun sebelumnya juga dilakukan penganggaran.
5. Anggaran Berbasis Kinerja
Model ini yang sedang dikembangkan di sector publik saat ini, termasuk Indonesia. Anggaran berbasis kinerja merupakan model penyusunan anggaran berbasis kinerja yang ingin dicapai. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerjanya, baik itu input, output, dan outcome dari kegiatan tersebut.

Pengaruh Pergantian Pimpinan terhadap Penyerapan Anggaran

Kansil (2000) menjelaskan bahwa kekuasaan negara diberikan kepada pemerintah atau penguasa untuk mengatur negara dan menjaga wilayah kekuasaannya dari kekuasaan negara lain. Pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh Presiden di level pemerintah pusat, gubernur di level pemerintah provinsi dan wallikota/bupati ditingkat kota/kabupaten.

Amanat undang-undang memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk menjadi kepala pemerintahan melalui proses pemilihan umum yang dilangsungkan sekali dalam lima tahun. Pergantian kepemimpinan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah sebab setiap pemimpin yang dihasilkan oleh pemilihan kepala daerah sangat mungkin memiliki visi dan cara yang pandang yang berbeda satu sama lain. Sehingga pergantian kepemimpinan ditengarai memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Penelitian Arief dan Halim (2015) menemukan adanya pengaruh pergantian pimpinan terhadap penyerapan anggaran. Oleh karena itu, hipotesis 1 (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Pergantian pimpinan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah.

Pengaruh Dokumen Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) dan memperhatikan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas). Dimana visi, misi, dan program Kepala Daerah menjadi bahan utama penyusunan agenda kerja selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Masalah dilapangan yang sering terjadi antara lain anggaran kegiatan diblokir/tanda bintang karena belum ada data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPRD atau karena anggaran tidak selaras dengan RPJMD. Hal ini kadang menyebabkan DIPA mengalami revisi. Revisi DIPA yang memerlukan waktu yang tidak sedikit sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran. Maka, hipotesis kedua yang akan diuji adalah:

H₂: Dokumen perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah.

Pengaruh Sistem Administrasi terhadap Penyerapan Anggaran

Definisi administrasi dalam arti sempit menurut Handyaningrat (1988:2) meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan". Dalam arti yang lebih luas, Gie dalam Putri (2014) mengatakan "Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu".

Persoalan terkait administrasi yang ersingkali terjadi di pemerintahan antara lain kesalahan penentuan akun, masa peneleaaan anggaran yang terlalu pendek, adanya tambahan pagu karena ABT, tambahan/luncuran PHLN/PHDN, penerimaan hibah, berubahnya pelaksanaan kegiatan atas dasar memo kepala daerah, verifikasi yang terlalu lama dari PPKAD/BUD. Masalah-masalah ini ditengarai dapat mempengaruhi realisasi kegiatan pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan Herriyanto (2012) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa administrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H₃: Pencatatan administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah.

Pengaruh Kompetensi SDM Berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

Nawawi (2001) mendefinisikan sumber daya manusia (SDM) sebagai potensi manusiawi yang menjadi penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Berbagai riset telah membuktikan peran besar SDM dalam pencapaian tujuan organisasi. Demikian halnya dengan organisasi pemerintahan yang dalam 15 tahun

terakhir terus mengalami transformasi setelah adanya reformasi birokrasi dan pemerintahan. Keberhasilan reformasi pemerintahan sangat bergantung pada kualitas SDM yang dimiliki.

Hasil penelitian Herriyanto (2012) menemukan adanya pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran di satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta. Maka untuk menguatkan teori ini, hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini:

H₄: Kompetensi SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah.

Pengaruh Dokumen Pengadaan terhadap Penyerapan Anggaran

Dokumen pengadaan barang dan jasa meliputi dokumen pemilihan penyedia dan dokumen pra/pascakualifikasi. Penelitian Siswanto dan Rahayu (2011) menemukan empat masalah yang menyebabkan terganggunya penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga pemerintah. Salah satunya dikarenakan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Beberapa persoalan terkait dengan dokumen pengadaan antara lain penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak berdasarkan keahlian dan tidak melakukan survey pasar, berkas pengadaan yang kurang lengkap, dan pejabat pengelola seringkali mengalami mutasi. Persoalan-persoalan sangat mungkin mempengaruhi realisasi anggaran belanja pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis kelima yang diuji dalam penelitian ini adalah:

H₅: Dokumen pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yang merupakan pegawai SKPD dalam lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang menduduki jabatan yang berkaitan dengan anggaran, yang meliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP SPM), Bendahara. Kuesioner dibagikan ke responden penelitian. Kuesioner tersebut selanjutnya dikumpulkan dalam waktu satu minggu. Jumlah kuesioner terkumpul kembali sebanyak 60 responden yang merepresentasi 15 SKPD dalam lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengujian hipotesis menggunakan alat uji statistik yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri atas Pergantian Pimpinan, Dokumen Perencanaan, Pencatatan Administrasi, Kompetensi SDM, Dokumen Pengadaan, sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah Penyerapan Anggaran. Persamaan model regresi penelitian ini sebagai berikut:

Mutmainna, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran...

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

- b_0 : Konstanta
- b_{1-5} : Koefisien Regresi untuk variabel X_1 - X_5
- X_1 : Pergantian Pimpinan
- X_2 : Dokumen Perencanaan
- X_3 : Sistem Administrasi
- X_4 : Kompetensi SDM
- X_5 : Dokumen Pengadaan
- e : error term

Variabel pergantian pimpinan didefinisikan sebagai pergantian kepala daerah dan/atau kepala SKPD. Variabel ini dioperasionalisasi dengan menggunakan 2 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Arief dan Halim (2015). Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert. Dokumen perencanaan meliputi RPJMD, Rencana Strategi (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Variabel ini diukur dengan menggunakan 9 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Herriyanto (2012) dan Putri (2014).

Sistem administrasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, pengarsipan, serta kegiatan lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi. Variabel ini diukur dengan enam item pertanyaan yang dikembangkan oleh Herriyanto (2012) dan Putri (2014). Kompetensi SDM adalah kompetensi pegawai yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa dalam merealisasikan anggaran belanja pemerintah. Variabel ini diukur dengan pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan Herriyanto (2012) dan Putri (2014).

Dokumen pengadaan adalah dokumen yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dokumen pengadaan berisi pengumuman mengenai lingkup pekerjaan, persyaratan peserta, waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen, undangan kepada penyedia barang/jasa, instruksi kepada peserta pengadaan, bentuk penawaran dan perjanjian, syarat-syarat kontrak, data kontrak, spesifikasi teknis, dan daftar kuantitas dan harga. Variabel ini diukur melalui pertanyaan yang dikembangkan oleh Herriyanto (2012) dan Putri (2014). Penyerapan anggaran adalah tingkat realisasi anggaran yang telah disusun. Variabel ini diukur dengan pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herriyanto (2012).

PEMBAHASAN

Responden penelitian ini sebanyak 54 orang yang terdiri dari 57% pria dan 43% wanita. Jumlah tersebut mewakili 15 SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada di Kota Makassar. Seluruh responden adalah lulusan perguruan tinggi (sarjana strata 1). Lama bekerja responden bervariasi, 22% memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun, 47% bekerja antara 5 sampai 10 tahun, dan

31% telah bekerja lebih dari 10 tahun. Klasifikasi jabatan masing-masing responden juga beragam. Responden yang memegang jabatan sebagai PPK sebanyak 22%, PPTK 24%, PP-SPM 26%, dan Bendahara pengeluaran sebanyak 28%.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t melalui analisis regresi linear berganda. Hasil dari regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisiensi	Nilai Kofisiensi	Nilai t	Sig	Status
Pergantian pimpinan(X1)	β 1	0.172	1.109	0.003	Diterima
Dokumen Perencanaan (X2)	β 2	0.166	1.206	0.034	Diterima
Pencatatan Administrasi (X3)	β 3	0.003	0.008	0.994	Ditolak
Kompetensi SDM (X4)	β 4	0.150	1.176	0.034	Diterima
Dokumen Pengadaan (X5)	β 5	0.116	1,503	0.036	Diterima
R Square=0,909 Adjusted R2=0,816 F=21.170 Signifikan=0,000N=54					

Sumber :Data Primer diolah, 2017

Pengaruh Pergantian Pimpinan terhadap Penyerapan Anggaran.

Berdasarkan hasil uji statistik pengaruh pergantian pimpinan terhadap penyerapan anggaran pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai t-statistik berada pada kisaran 1.109 dengan nilai p- statistik berada pada tingkat 0,003 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_1) diterima. Hal ini membuktikan bahwa pergantian pimpinan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Hasil ini penelitian ini menunjukkan bahwa setiap pergatian pimpinan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi memiliki dampak terhadap tingkat penyerapan anggaran. Nilai koefisien regresi sebesar 0,172 megandung makna bahwa setiap perubahan 1 satuan pergantian pimpinan SKPD akan meningkatkan penyerapan anggaran SKPD sebesar 0,172.

Hasil ini sejalan dengan temuan Arif dan Halim (2015) yang juga meneliti faktor politik (pergantian pimpinan) terhadap serapan anggaran di kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Temuan di lapangan, pergantian pimpinan SKPD adalah kelaziman karena merupakan hak prerogatif kepala daerah. Kepala daerah dapat dengan mudah kapan saja melaksanakan mutasi pejabat jika dianggap tidak sejalan dengan dengan visi dan misi kepala daerah atau sebagai reward maupun punishment atas kinerja pejabat SKPD.

Oleh karena itu, setiap pimpinan SKPD yang baru saja dilantik akan dipacu untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan meningkat serapan anggaran di SKPD yang dipimpin. Temuan ini mempertegas pentingnya bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja pejabat publik dengan memberikan reward dan punishment atas kinerja yang mereka capai. Mutasi jabatan publik dengan

pendekatan kinerja akan mendorong tercapainya sasaran kinerja pemerintah melalui serapan anggaran yang tinggi.

Pengaruh Dokumen Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil uji statistik pengaruh dokumen perencanaan terhadap penyerapan anggaran menunjukkan nilai t-statistik berada pada kisaran 1.206 dengan nilai p-statistik berada pada tingkat 0,034 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_2) diterima. Hal ini membuktikan bahwa dokumen perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan memiliki arah pengaruh positif.

Nilai koefisien regresi sebesar 0,166 mengandung makna bahwa setiap peningkatan 1 satuan dokumen perencanaan akan meningkatkan 0,166 penyerapan anggaran pemerintah. Artinya, semakin baik dan lengkap dokumen pengadaan disusun maka penyerapan anggaran akan semakin tinggi.

Hasil ini juga mengindikasikan bahwa penting bagi SKPD untuk menyusun dokumen perencanaan sebaik-baiknya agar tidak menghambat penyerapan anggaran. Sebaran responden atas pertanyaan terkait dengan dokumen perencanaan sebanyak 42% memberikan jawaban pada skala 2 yang berarti dokumen perencanaan yang ada pada SKPD di pemerintah provinsi Sulawesi Selatan masih belum teratur. Akibatnya, serapan anggaran yang direalisasikan oleh SKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum maksimal.

Temuan di lapangan, penyusunan dokumen perencanaan baik itu RKA SKPD, APBD, dan DIPA seringkali molor dan tidak lengkap sehingga menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran hingga sebagian kegiatan pemerintah tidak sempat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan bertumpuknya realisasi kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Persoalan lain yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran adalah adanya revisi dari DIPA karena tidak selaras dengan RPJMD dan kebutuhan daerah, persetujuan revisi DIPA oleh pejabat berwenang mengalami keterlambatan, dan perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) terlambat ditetapkan.

Pengaruh Pencatatan Administrasi terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil uji statistik pengaruh pencatatan administrasi terhadap penyerapan anggaran pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t-statistik berada pada kisaran 0,008 dengan nilai p-statistik berada pada tingkat 0,994 lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_3) ditolak. Hasil ini menunjukkan sistem administrasi di pemerintah provinsi selatan tidak berpengaruh terhadap realisasi anggaran.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Heriyanto (2012) yang menemukan adanya pengaruh administrasi terhadap penyerapan anggaran. Meski demikian, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2014) sebenarnya juga menemukan tidak adanya pengaruh sistem administrasi terhadap penyerapan anggaran. Artinya, baik atau buruknya sistem administrasi di SKPD tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Adanya gap hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa teori terkait dengan pengaruh sistem administrasi terhadap penyerapan anggaran masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Temuan di lapangan, beberapa persoalan yang mengganggu penyerapan anggaran terkait dengan masalah administrasi antara lain:

1. Kesalahan penentuan akun
2. Masa penyusunan dan peneleahan anggaran terlalu pendek
3. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran
4. Adanya tambahan PAGU karena ABT
5. Adanya tambahan PHLN/PHDN
6. Penerimaan hibah
7. Berubahnya pelaksanaan kegiatan atas dasar memo kepala daerah
8. Verifikasi yang terlalu lama di PPKAD/BUD

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil uji statistik, pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai t-statistik berada pada kisaran 1.176 dengan nilai p-statistik berada pada tingkat 0,034 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_4) diterima.

Nilai koefisien regresi sebesar 0,150 mengandung makna bahwa setiap peningkatan 1 satuan kompetensi SDM akan meningkatkan 0,150 penyerapan anggaran pemerintah. Semakin tinggi tingkat kemampuan SDM dalam sebuah SKPD maka akan menyebabkan tingkat penyerapan anggaran tinggi. Ini berarti semakin memadai kompetensi sumber daya manusia yang ada pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Heriyanto (2012) dan Putri (2014). Penelitian mereka juga menunjukkan adanya pengaruh kompetensi SDM terhadap serapan anggaran.

Dalam hal penyerapan anggaran, kendala pemerintah yang berhubungan dengan kompetensi SDM meliputi:

1. Kompetensi SDM pengadaan barang dan jasa pemerintah masih kurang
2. Panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah melaksanakan tugas lebih dari satu (rangkap jabatan)
3. Keterbatasan aparat pemerintahan yang memiliki sertifikasi pengadaan.

Hasil penelitian ini semakin menguatkan pentingnya bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi SDM yang mereka miliki terutama yang berhubungan dengan anggaran, seperti penyusun anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan, bendahara, dan lain-lain.

Saat ini sebenarnya telah ada regulasi pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010) tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mewajibkan sertifikasi bagi pegawai yang menduduki jabatan terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hanya saja, jumlah pegawai pemerintah yang memiliki sertifikasi saat ini masih sedikit dikarenakan pelaksanaan pelatihan dan ujian yang terbatas dan tingkat kelulusan yang rendah disetiap pelaksanaan ujian sertifikasi.

Pengaruh Dokumen Pengadaan terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil uji statistik, pengaruh dokumen pengadaan terhadap penyerapan anggaran pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai t-statistik berada pada kisaran 1.503 dengan nilai p-statistik berada pada tingkat 0,036 lebih kecil dari 0.005, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_5) diterima.

Nilai koefisien regresi sebesar 0,166 berarti setiap peningkatan 1 satuan dokumen pengadaan maka akan meningkatkan 0,166 penyerapan anggaran. Hal ini berarti semakin baiknya dokumen pengadaan yang ada pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran, sehingga variabel dokumen pengadaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Hasil ini sejalan dengan penelitian Siswanto dan Rahayu (2011).

Dokumen pengadaan meliputi lingkup pekerjaan, persyaratan peserta, waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen, undangan kepada penyedia barang/jasa, instruksi kepada peserta pengadaan, bentuk penawaran dan perjanjian, syarat-syarat kontrak, data kontrak, spesifikasi teknis, dan daftar kuantitas dan harga.

Masalah yang sering terjadi terkait dengan dokumen pengadaan antara lain:

1. Keterlambatan dan kekeliruan dalam menyusun HPS.
2. Perhitungan HPS membutuhkan data primer tentang detail spesifikasi barang yang akan diadakan serta harga yang berlaku dipasaran. Hal ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
3. Ketidaksesuaian antara kebutuhan barang dengan spesifikasi teknis yang disusun oleh PPK. Hal ini menyebabkan terhambatnya realisasi belanja barang dan jasa pemerintah.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan semakin sering terjadi pergantian pimpinan pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maka akan mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran SKPD. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dokumen perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran oleh SKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jika suatu penataan dokumen perencanaan tidak teratur maka penyerapan anggaran pun akan menurun. Pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan baik atau buruknya sistem pencatatan administrasi yang ada pada suatu SKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak mempengaruhi penyerapan anggaran. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan semakin memadai kompetensi SDM yang ada pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran. Dokumen pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan semakin baik dokumen pengadaan yang disajikan pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan waktu penelitian dan jumlah sampel yang masih terbatas hanya pada SKPD yang berada di Kota Makassar sementara lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya di Kota Makassar tetapi juga terdapat di daerah lain di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk itu disarankan bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji topik yang sama agar memperluas sampel yang digunakan dalam penelitian sehingga hasil penelitian lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Emkhad dan Abdul Halim. 2015. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 *www.jurnalkiatuir.com/jurnal/index.php/jurnal-ekonomi/article/view/45* Diakses 20 Januari 2016
- Herryanto, Hendris. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. *Tesis* (Tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kansil. Christine S.T. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Miliasih, Retno. 2012. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. *Tesis* (Tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nawawi. 2001. *Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit yang Kompetitif*. GM University Press, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta
- Handyaningrat, Soewarno. 2008. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 54 tahun 2010. Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Putri, C.T 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Panggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Skripsi*. Fakultas Ekonomu dan Bisnis. Universitas Bengkulu.

Mutmainna, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran...

Siswanto, Adrianus Dwi dan Sri Lestari Rahayu. 2011 *Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010*. www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/.../Kementerian_lembaga.pdf diakses pada 16 Januari 2016

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.